Tribun Jogja -1-
SELASA LEGI
26 APRIL 2016

NEWS ANALYSIS

Publik Bisa Ikut Merayakan saat Pelantikan di Yogya

TUNJUNG SULAKSONO
Pengamat Politik UMY

PELANTIKAN Pelantikan Wakil Gubernur yang dilaksanakan di DIY mungkin saja terjadi. Acuannya adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 yang menyebutkan bahwa pelantikan hanya akan dilakukan di istana negara. Itu akan menimbulkan multitafsir mengingat istana negara tidak hanya berada di Jakarta, ada di daerah lain, dan satu di antaranya ada di DIY.

Beberapa anggota DPRD DIY jelas berharap bahwa pelantikan bisa dilakukan di

● ke halalaman 11

Publik Bisa Ikut Merayakan saat

● Sambungan **Hal 1**

Yogya untuk menambah wibawa keistimewaan DIY. Selain itu, bila pelantikan dilakukan di Yogya, anggaran Rp 1,1 miliar lebih yang berasal dari anggaran keistimewaan Danais, dengan asumsi seluruh anggota DPRD DIY berangkat ke Jakarta, tidak akan dihabiskan begitu saja.

Bakal ada banyak efisiensi dari Pemda DIY ketika pelantikan itu dilaksanakan di Yogya.

Lalu dari sisi masyarakat, kemungkinan mereka akan melakukan selebrasi yang besar saat pelantikan terjadi di DIY. Masyarakat telah menunggu cukup lama untuk mendapatkan Wagub yang baru ini. Saya melihat ada upaya selebrasi, syukuran, dan sebagainya karena berkaitan dengan kedekatan emosional.

Namun bukan berarti bila pelantikan tidak di DIY, masyarakat akan diam saja. Mereka tetap akan menggelar perayaan, bisa jadi dengan kirab maupun sekadar nonton bareng.

Tapi, bila saya menilai dari efisiensi pemerintah pusat, presiden tidak hanya melantik satu wagub saja. Beliau akan melantik beberapa gubernur dan wagub dalam satu waktu untuk efisiensi waktu karena padatnya jadwal. Sehingga mungkin juga Presiden tetap menghendaki pelantikan digelar di Jakarta.

Bukan inti masalah

Tapi di mana pun pelantikan tersebut berlansung, bukan ada di sana permasalahan keistimewaan DIY. Arti pentingnya adalah bagaimana keistimewaan itu bisa membawa perbaikan dan kesejahteraan masyarakat.

Resminya Paku Alam X menjabat sebagai Wagub nanti diharapkan tidak sekedar menjadi 'ban serep', tapi secara substantif dilibatkan dalam menjadikan DIY sebagai provinsi yang mampu memberikan pelayanan yang baik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Semoga bisa meneladani duet yang luar biasa seperti yang dilakukan HB IX dan PA VIII dulu, hingga kekompakan berdua tadi bisa ditransformasi dalam pembagian tugas yang tak mudah. Sehingga beban tugas Sultan juga tereduksi karena ada transfer kewenangan dan pembagian tugas. Mungkin di bidang ekonomi atau pendidikan. **(kur)**